

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Menyerahnya Jepang terhadap sekutu tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 telah menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Hasil dari perjuangan yang dinantikan oleh rakyat Indonesia akhirnya tercapai. Lewat berbagai dinamika yang ada dari beberapa golongan, Indonesia berhasil mengumandangkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 di pagi hari dengan suatu pembacaan proklamasi oleh Sukarno-Hatta. Hal ini menjadi pertanda bahwa Republik Indonesia sebagai sebuah negara telah lahir.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan sekadar pengumuman yang mengandung formalitas belaka dan bukan juga secarik kertas tanpa isi. Tetapi, apa yang tertulis di dalam proklamasi tersebut harus segera terwujud secara nyata sebab sebagai bentuk realisasi masyarakat Indonesia atas cita-citanya untuk merdeka dengan berjuang secara gigih (H. Maulana, 2018). Adapun bentuk implementasi terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah dengan menyusun suatu pemerintahan. Salah satu susunan pemerintahan yang dibentuk pertama-tama setelah Indonesia merdeka adalah penetapan presiden dan wakil presiden. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dengan memilih Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden (Sundhaussen, 1986).

Kedudukan dan peran presiden sebagai pemimpin dalam sebuah negara memang hal yang sangat penting. Peran ini dimainkan oleh presiden ketika menentukan arah kebijakan serta keputusan strategis yang akan berdampak pada setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, presiden adalah simbol dan lambang suatu negara dalam struktur kenegaraan. Di sini, presiden mencerminkan martabat, identitas, serta wibawa negara secara menyeluruh dan menjadi representasi nyata dari eksistensi kedaulatan negara baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pentingnya kedudukan dan peran pemimpin negara ini membuat seorang presiden akan sangat berdekatan dengan potensi ancaman yang berbahaya dari berbagai pihak ataupun golongan. Apalagi Indonesia yang baru merdeka terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan ideologi di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan dari seorang presiden pasti tidak bisa diterima oleh semua orang, akan ada pihak atau golongan yang merasa tidak puas atas kebijakan tersebut. Menurut Utama (2015), pihak atau golongan yang tidak puas ini akan merespon dengan berbagai cara, mulai dari melakukan kritik, memberi saran, hingga sampai melanggar etika secara politik, seperti menghujat, bahkan melancarkan pembunuhan.

Untuk mencegah dan melindungi presiden dari potensi ancaman yang berbahaya, maka dibutuhkan pasukan penjaga dan pengawal seorang presiden. Hal tersebut karena tidak bisa dilepaskan dari peran fundamental seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan serta negara dari keputusan dan kebijakan yang diterapkan. Secara keseluruhan, ancaman yang dihadapi presiden artinya ancaman terhadap kestabilan negara. Oleh sebab itu, diperlukan pasukan yang sigap dan setia dalam menjaga serta mengawal presiden tersebut. Hadirnya pasukan ini membawa jaminan bahwa seorang presiden tetap dapat melaksanakan tugas yang teramat penting sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Untuk melindungi presiden, pasukan ini siap mati dan rela nyawa mereka menjadi taruhannya.

Pasukan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal Presiden Republik Indonesia sudah ada ketika Indonesia dipimpin oleh Sukarno. Dilansir dari Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentara Nasional Indonesia (PPID TNI), Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden memiliki kelahiran yang sama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Polri. Kala itu, para pemuda pejuang memiliki peran dalam mengawal presiden. Pemuda-pemuda ini adalah dari Kesatuan Polisi Macan (*Tokomu Kosaku Tai*) yang merupakan organisasi militer bentukan Jepang. Kesatuan Polisi Macan (*Tokomu Kosaku Tai*) sendiri merupakan bagian dari

Pasukan Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) yang lingkup tugasnya berada di karesidenan Jakarta Raya.

Tokomu Kosaku Tai kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya Polisi Pengawal Pribadi (PPP) Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utamanya adalah menjaga keselamatan presiden dan wakil presiden beserta anggota keluarganya yang terletak di Jakarta Raya. Lokasi yang menjadi markas Polisi Pengawal Pribadi (PPP) Presiden dan Wakil Presiden pada awalnya adalah di Jalan Sunda No. 18 Jakarta (sekarang Jalan Gereja Theresia) yang dulunya adalah bekas sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Kemudian dipindahkan lagi ke gedung Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Veteran untuk sementara waktu sebelum pada akhirnya mereka ke asrama baru yang lokasinya di Jalan Pegangsaan Timur 45 dan 47 dengan persisnya di depan rumah Presiden Sukarno (Hutama & Muryadi, 2015).

Ketika ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta pada 1946, PPP mempunyai peran dalam menjaga presiden dan para petinggi negara dari Jakarta ke Yogyakarta menggunakan kereta luar biasa. Setelah pindah, barulah, PPP selanjutnya diubah namanya menjadi Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dengan Mangil Martowidjojo sebagai komandannya (Ikror, 2023). Sebagai komandan DKP kala itu, Mangil Martowidjojo mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas, DKP dibantu oleh Polisi Tentara Angkatan Darat yang sekarang disebut dengan Polisi Militer. Pembagian tugasnya adalah DKP di dalam gedung istana presiden dan wakil presiden sementara Polisi Militer menjalankan tugas di luar istana (Isnaeni, 2023).

Berbagai upaya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada sekitar 1957 sampai 1962 terjadi, seperti Tragedi Cikini, penembakan Istana Merdeka oleh pilot Angkatan Udara bernama Alexander Maukar, peristiwa di Jalan Cendrawasih Makassar, dan penembakan Sukarno ketika Salat Idul Adha membuat DKP dirasa tidak cukup. Alhasil, menurut Isnaeni (2023), dibentuklah Resimen Cakrabirawa melalui Surat Keputusan No.211/Pit/1962 dengan Brigjen CPM Moh. Sabur sebagai komandannya dan wakilnya adalah CPM Maulwi Saelan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pembentukan serta perkembangan Pasukan Penjaga Presiden mulai dari Polisi Pengawal Pribadi Presiden hingga ke Detasemen Kawal Pribadi Presiden dari rentang waktu 1945-1962.

Ketertarikan penulis untuk mengangkat topik ini karena ingin menghidupkan narasi Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden sebelum Resimen Cakrabirawa yang eksistensinya kerap terhalang oleh Resimen Cakrabirawa itu sendiri yang berdiri pada tahun 1962-1967 dengan jumlah pasukannya yang sangat besar. Jika dilihat, pembentukan pasukan yang bertugas untuk menjaga dan mengawal presiden sebelum Resimen Cakrabirawa itu sudah ada, namun kurang terdokumentasikan dan masih berserakan pada sumber-sumber yang lain. Hanya terdapat pada kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah terlibat di dalamnya. Maka penelitian ini berusaha mengumpulkan dan juga menghimpun berbagai informasi mengenai Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden sebagai suatu narasi yang utuh.

Alasan selanjutnya mengapa penulis mengambil topik tentang Pasukan Penjaga Presiden tahun 1945-1962 karena untuk menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi pada pasukan tersebut. Hal ini lantaran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) masih eksis sampai sekarang, maka dengan merekonstruksi sejarahnya kita bisa mengungkap identitas dan jati diri dari pasukan yang menjadi cikal bakal Paspampres di masa kini.

Berikutnya yang menjadi alasan penulis karena Pasukan Penjaga dan Pengawal Sukarno merupakan saksi dalam peristiwa penting politik suatu negara. Dengan melakukan kajian terhadapnya, penulis mencoba mengungkap perspektif militer atas terjadinya peristiwa politik suatu negara yang dilakoni oleh tokoh-tokoh politisi. Hal ini tentunya dapat membawa pandangan yang beragam dan pengetahuan yang luas atas fenomena-fenomena yang klise, di mana peristiwa politik biasanya ditanggapi secara politik juga. Selain itu, hal ini dapat mengungkapkan pernyataan lain yang mungkin tidak diungkapkan oleh tokoh politisi atau bahkan Sukarno sekalipun sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dari kalangan elit politik dan militer.

Selain yang sudah dijelaskan di atas, alasan penulis tertarik mengangkat topik ini berhubungan dengan pembelajaran sejarah. Kajian sejarah mengenai Pasukan Pengawal Sukarno yang penulis jadikan penelitian dapat menjadi opsi atau jalan lain dalam menerangkan konten pembelajaran sejarah Indonesia mulai dari masa revolusi fisik di awal kemerdekaan Indonesia, demokrasi liberal, sampai demokrasi terpimpin yang diajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mata pelajaran sejarah. Selain itu, kajian Pasukan Penjaga dan Pengawal Sukarno ini menjadi bahan studi yang menarik untuk membantu memahami situasi atau kondisi serta dinamika sosial, politik, ekonomi, dan militer yang berlangsung di zaman itu.

Jika dilihat dari pengamatan penulis, penelitian yang mengkaji tema serupa masih belum banyak, walaupun sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai Pasukan Pengamanan Presiden sebelumnya. Salah satunya adalah skripsi yang dikarang oleh Radite Jiwa Utama pada 2015 dengan judul “*Resimen Cakrabirawa (1962-1967)*”. Skripsi tersebut menguraikan pembentukan serta perjalanan Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden yang berlangsung dari tahun 1962-1967 dengan nama Resimen Cakrabirawa melalui kacamata historis. Penelitian lainnya ditulis pada 2018 oleh Ricky A. Nuryadi yang berjudul “*Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Dalam Tugas Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*” dengan tesis sebagai bentuknya. Fokus pembahasan pada tesis tersebut adalah tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Pasukan Pengamanan Presiden, serta kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam mengatasi rintangan yang dapat membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden. Berikutnya adalah penelitian yang berbentuk artikel dari jurnal dengan judulnya adalah “*Pembentukan Konsep Diri Satuan Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia*” yang berhasil diselesaikan oleh Melani Kurniasih, dkk pada 2021. Tulisan ini berfokus pada keadaan dan fakta seputar Pasukan Pengamanan Presiden, yang merupakan unit elit yang terdiri dari prajurit yang dipilih secara khusus dan memiliki harga diri. Akibatnya, setiap anggota Pasukan Pengamanan Presiden memiliki pendapat tentang diri mereka sendiri yang berkualitas dan lebih unggul daripada anggota unit lainnya. Terakhir adalah

penelitian berbentuk skripsi yang berhasil diselesaikan pada 2023 oleh Aminnur Rasyid di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “*Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*”. Inti pembahasan dari penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa presiden membutuhkan Pasukan Pengamanan Presiden untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika keamanan Presiden terancam, maka akan berdampak pada negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, Pasukan Pengamanan Presiden mendapatkan kedudukan sebagai salah satu unsur penting di dalam ketatanegaraan dan memperoleh tempat sendiri, khususnya pada tugas sebagai pengamanan terhadap presiden dan VVIP kenegaraan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tema Pasukan Pengamanan Presiden, pada nyatanya terdapat perbedaan yang signifikan dengan kajian yang penulis angkat. Umumnya, peneliti lain membahas Pasukan Pengamanan Presiden dari segi strategi dan kemampuan dalam bertugas, pembentukan konsep diri, serta kedudukannya dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sementara kajian yang penulis lakukan ini adalah membahas Pasukan Pengamanan Presiden dari sudut pandang sejarah pada tahun 1945-1962. Walaupun ada yang membahas sejarah Pasukan Pengamanan Presiden dengan judul penelitian “*Resimen Cakrabirawa (1962-1967)*” oleh Radite Jiwa Utama, tentu terdapat perbedaan juga dengan penulis dari segi tahun yang dikaji. Penulis mengkaji tahun penelitian dengan menarik waktunya jauh ke belakang pada saat Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaan hingga sebelum terbentuknya Resimen Cakrabirawa. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk mengangkat topik tentang Pasukan Penjaga Presiden tahun 1945-1962 karena topik tersebut dinilai masih sangat langka sehingga dapat membawa *novelty* (kebaruan) dan menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya. Rentang waktu 1945-1962 menjadi objek kajian penelitian yang penting untuk melengkapi penelitian terdahulu sebab dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang situasi dan kondisi terhadap terbentuknya Resimen Cakrabirawa pada 1962 yang sudah dijadikan objek penelitian sebelumnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dengan disesuaikan pada dasar pemikiran yang sudah dijelaskan di atas, pembatasan masalah penelitian yang penulis kaji untuk penelitian ini didasarkan pada temporal (waktu) dan spasial (ruang). Secara temporal, tahun 1945 dipilih sebagai awal dari penelitian ini karena tahun tersebut terbentuk Polisi Pengawal Pribadi (PPP) Presiden sebagai Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden setelah Indonesia merdeka. Sementara akhir dari batasan penelitian ini adalah tahun 1962 karena merupakan tahun terakhir dari Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Presiden sebagai kesatuan yang berdiri sendiri sebelum nantinya bergabung ke dalam satuan Resimen Cakrabirawa.

Sementara batasan spasial dalam penelitian ini akan membahas mengenai pembentukan dan perkembangan yang terjadi pada Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden Sukarno yang bernama Polisi Pengawal Pribadi (PPP) Presiden dan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Presiden dengan lingkup tugasnya dibatasi di Indonesia. Artinya, penelitian ini difokuskan pada pasukan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal Presiden Sukarno dari bahaya atau ancaman, baik ketika Sukarno menjadi Presiden Indonesia dengan sistem pemerintahan Presidensial maupun Parlementer. Dari segi tematik, skripsi ini merupakan bagian dari sejarah kepolisian Indonesia karena anggota yang tergabung dalam PPP dan DKP yang eksis tahun 1945-1962 terdiri dari unsur-unsur kepolisian.

2. Perumusan Masalah

Setelah dipadankan pada dasar pemikiran dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa dibentuk Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden?
- 2) Bagaimana proses pembentukan Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden?

- 3) Bagaimana perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden Sukarno dari rentang waktu 1945-1962?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah yang sudah penulis jabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi sejarah dan perkembangan Pasukan Penjaga Presiden mulai dari Polisi Pengawal Pribadi Presiden hingga ke Detasemen Kawal Pribadi Presiden pada rentang waktu 1945-1962.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini penulis bagi menjadi dua tataran, yaitu secara teoritik dan praktik. Adapun penjelasan dua hal tersebut dapat dilihat secara berikut.

1) Secara Teoritik

Diharapkan secara teoritik penelitian ini dapat berguna menjadi sumber atau referensi untuk bahan penelitian lanjut mengenai sejarah kepolisian Indonesia dan khususnya dalam sejarah pasukan pengamanan presiden. Selain itu, juga berguna sebagai sumbangan dan landasan untuk pengembangan studi mengenai sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Hal ini dapat memberikan warna dan perspektif yang baru dalam historiografi sejarah Indonesia masa tersebut, sebab penelitian ini menawarkan kajian mengenai sesuatu yang baru berupa Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden Sukarno yang belum banyak tersentuh akibat ramainya narasi mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia berupa revolusi fisik dan diplomasi, demokrasi liberal, hingga kepemimpinan tunggal Sukarno dalam demokrasi terpimpin pada historiografi sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin.

2) Secara Praktik

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan secara praktik dapat diterapkan menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan, refleksi, dan masukan kepada Pasukan Pengamanan Presiden di masa kini untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi serta menjadi acuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas dari setiap personel dengan berkaca pada situasi yang terjadi di masa lalu.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode historis. Artinya, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dan menafsirkan gejala peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan menggambarkan secara kritis seluruh fakta dan kebenaran yang terjadi. Menurut Gottschalk (1983), terdapat empat tahapan dalam metode historis, yakni heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Adapun kerja-kerja sejarah tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

Langkah pertama dalam metode historis adalah mengumpulkan dan menghimpun berbagai sumber atau dikenal dengan heuristik. Data atau sumber sejarah yang dihimpun pada tahapan ini adalah yang relevan dan berhubungan dengan tema penelitian yang dikaji. Sumber terbagi menjadi sumber primer dan sekunder berdasarkan sifatnya. Data utama yang didapat langsung dari pelaku, saksi, maupun benda sejarah adalah sumber primer. Artinya, kesaksian yang ditemukan dalam sumber ini didasarkan pada individu yang benar-benar mengalami, menyaksikan, dan mendengar suatu peristiwa sejarah. Sementara sumber yang digunakan sebagai pendukung dan pembuatannya setelah kejadian selesai adalah pengertian dari sumber sekunder. Dengan kata lain, sumber ini tidak berasal dari pelaku sejarah, tetapi pihak yang berada di luar para pelaku sejarah. Metode pengumpulan data atau sumber sejarah penulis lakukan dengan cara studi pustaka, studi arsip, dan wawancara. Studi pustaka artinya mencari data atau sumber melalui

kepastakaan, seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang sudah ada. Sementara cara mencari sumber dengan melalui dokumen-dokumen yang tersimpan dalam bentuk arsip disebut studi arsip. Sedangkan wawancara adalah tanya jawab langsung kepada seseorang yang disebut narasumber untuk memperoleh data atau informasi.

Dalam penelitian ini, terdapat sumber primer yang penulis gunakan. Sumber primer diperoleh dengan cara studi arsip. Adapun arsip tersebut berbentuk tulisan yang terdiri dari surat kabar, dokumen, dan memoar dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI). Selain itu, sumber primer lain yang bentuknya lisan akan penulis temui ke narasumber untuk melakukan wawancara. Adapun narasumbernya adalah Sribusono yang merupakan Purnawirawan anggota Detasemen Kawal Pribadi (DKP). Dalam menemukan Bapak Sribusono sebagai sumber primer yang berbentuk lisan, peneliti pada awalnya menjalin komunikasi dengan salah seorang penulis Historia.id yang sudah terlebih dahulu menulis kajian tentang Pasukan Penjaga Presiden Sukarno. Dari penulis Historia.id tersebut, peneliti memperoleh kontak anggota keluarga Bapak Sribusono dan kemudian menghubunginya untuk keperluan penelitian. Sedangkan untuk sumber sekunder berbentuk tulisan yang akan digunakan adalah buku dari koleksi pribadi penulis, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), serta Perpustakaan Pusat Sejarah TNI (PUSJARAH TNI), artikel-artikel dari jurnal, dan skripsi serta tesis dari beberapa universitas, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber sekunder ini penulis dapatkan dengan cara studi pustaka.

Setelah semua sumber berhasil dikumpulkan dan dihimpun, tahapan berikutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik terhadap sumber tersebut. Melakukan pengujian terhadap keaslian dan kredibilitas sumber yang digunakan penulis merupakan tujuan dari tahapan kritik sumber. Kritik sumber dapat berupa sumber lisan atau tertulis yang mencakup informasi dan

fakta tentang topik penelitian. Umumnya, dua jenis kritik yang dilakukan adalah kritik ekstern dan intern.

Kritik pertama yang dilakukan terhadap sumber adalah kritik ekstern. Kritik ini melibatkan pengujian terhadap keaslian atau otentisitas dari sumber yang sudah didapatkan, baik sumber tertulis maupun lisan. Adapun contoh kegiatan yang dilakukan penulis pada kritik ekstern misalnya ketika membaca Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* yang terbit tahun 1945 dan 1946 harus dibarengi juga dengan memperhatikan unsur-unsur eksternal, seperti memeriksa tanggal, penulis, bahan material sumber (tulisan atau ketikan), dan kertas yang digunakan. Selain itu, kritik ekstern juga dilakukan penulis terhadap sumber lisan. Contoh yang dilakukan pada hal ini adalah ketika mewawancarai narasumber penulis memperhatikan usia, kondisi kesehatannya, dan juga daya ingatannya terhadap suatu peristiwa. Penulis mendapati narasumber yang bernama Sribusono mempunyai usia tidak muda lagi sehingga kemungkinan terdapat keterbatasan dalam hal ingatan. Akan tetapi, untuk melanjutkan penelitian penulis, kegiatan wawancara tetap dilakukan.

Setelah kritik ekstern dianggap layak, kritik berikut yang dilakukan adalah kritik intern. Melakukan pengujian terhadap kredibilitas isi atau kebenaran sejarah dari sumber yang didapatkan merupakan kritik intern. Untuk menguji kredibilitas isi atau kebenaran sejarah suatu sumber, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan sumber yang satu dengan lainnya. Contohnya adalah membandingkan buku yang ditulis Mangil Martowidjojo berjudul "*Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*" dengan buku yang ditulis Maulwi Saelan berjudul "*Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*". Dari dua buku yang ditulis oleh anggota penjaga dan pengawal presiden tersebut, apakah memiliki informasi yang sama atau berbeda mengenai pasukan yang bertugas untuk menjaga dan mengawal Presiden Sukarno. Selain itu, penulis juga membandingkan hasil wawancara narasumber dengan sumber primer berbentuk tulisan. Sebagai contoh, penulis mendapati hasil wawancara

dengan Sribusono yang menyatakan bahwa ketika terjadi penembakan terhadap Sukarno pada Salat Idul Adha tahun 1962 sebenarnya sudah diperoleh informasi dari intel Bogor ada yang hendak membunuh Presiden Sukarno. Dari sinilah, isi informasi tersebut penulis verifikasi melalui buku yang ditulis oleh anggota Pasukan Penjaga dan Pengawal Presiden Sukarno lainnya yang hidup sezaman, seperti buku "*Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*" yang ditulis Mangil Martowidjojo dan buku "*Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*" dengan penulisnya Maulwi Saelan.

Tahapan selanjutnya setelah sumber sejarah diverifikasi adalah interpretasi. Pada tahapan ini peneliti melakukan tafsiran isi atas sumber yang sudah dianggap layak. Hal tersebut bertujuan supaya penulis memperoleh makna serta hubungan antara data dan fakta sejarah yang dapat berguna untuk melakukan rekonstruksi sejarah yang ingin ditulis. Adapun yang menjadi perhatian pada tahapan ini adalah penafsiran yang dilakukan harus didasarkan pada sikap objektif dan meminimalisir sikap subjektif. Setidaknya terdapat dua cara interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Proses untuk menguraikan dan menjelaskan fakta sejarah secara rinci dan mendalam disebut interpretasi analisis sementara upaya untuk menggabungkan dan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bermakna disebut interpretasi sintesis. Contoh pada interpretasi analisis misalnya didapati data yang menunjukkan bahwa Pasukan Penjaga dan Pengawal Sukarno tahun 1945-1962 dicikal bakali oleh para anggota *Tokomu Kosaku Tai* yang merupakan Pasukan Polisi Istimewa zaman Jepang di Jakarta. Data lain juga menunjukkan bahwa anggota pasukan tersebut memiliki pangkat kepolisian, tinggal di asrama polisi, serta bemarkas di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasukan Penjaga dan Pengawal Sukarno tahun 1945-1962 terbatas pada anggota kepolisian dan tidak dimasuki unsur tentara, baik angkatan darat, laut, serta udara. Sementara pada contoh interpretasi sintesis diperoleh data tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terpilihnya Presiden Republik Indonesia, terbentuknya

berbagai lembaga keamanan negara, adanya upaya pembunuhan terhadap presiden, pertempuran, pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan. Dari sinilah dapat ditemukan fakta bahwa adanya pengamanan presiden.

Tahapan terakhir yang dilaksanakan pada penelitian sejarah dinamakan penulisan sejarah. Langkah ini melibatkan penyusunan data deskripsi yang telah diseleksi dari bahan yang masih mentah, lalu diolah menjadi teks atau tulisan, dan disajikan secara teratur, logis, serta mudah dipahami. Pedoman penulisan ilmiah juga harus dipatuhi dalam hal ini.

2. Bahan Sumber

Penulis dalam menunjang penelitian ini menggunakan sumber atau data yang relevan dengan kajian penelitian yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dengan bentuknya tertulis dan lisan. Sumber primer diperoleh dengan cara studi arsip. Adapun arsip tersebut berbentuk tulisan yang terdiri dari surat kabar, dokumen, dan memoar dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI). Surat kabar yang akan digunakan antara lain Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, Surat Kabar *Nasional*, dan Surat Kabar *Pedoman*. Dokumennya adalah Arsip Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 1945-1950 dan Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949. Untuk memoar adalah memoar yang ditulis Mangil Martowidjojo dan sudah dibukukan dengan judul “*Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*” serta memoar yang ditulis H. Maulwi Saelan dan sudah dibukukan dengan judul “*Kesaksian Wakil Komandan Tjkrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*”.

Terdapat sumber primer lain yang bentuknya lisan dan akan penulis temui ke narasumber untuk melakukan wawancara. Adapun narasumber yang dimaksud bernama Sribusono yang merupakan Purnawirawan anggota Detasemen Kawal Pribadi (DKP).

Sementara sumber sekunder yang berbentuk tulisan juga dipakai dalam mengkaji penelitian ini. Cara memperoleh sumber ini dengan menggunakan studi pustaka. Adapun sumber sekunder berbentuk tulisan yang akan

digunakan adalah buku dari koleksi pribadi penulis, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), serta Perpustakaan Pusat Sejarah TNI (PUSJARAH TNI), artikel-artikel dari jurnal, dan skripsi, serta tesis dari beberapa universitas, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Buku-buku yang akan dipakai di antaranya adalah buku Asvi Warman Adam, dkk dengan judul "*Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno*", buku karangan Swadesta Arya Wasesa yang berjudul "*Soekarno: Dipuja, Dibunuh, dan Dikenang*", buku berjudul "*Perkembangan Kepolisian di Indonesia*" karangan M. Oudang, buku berjudul "*Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*" yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, dan buku dengan penulisnya Yahya. A. Muhaimin yang judulnya adalah "*Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*".

Adapun artikel-artikel yang digunakan dari jurnal diantaranya adalah artikel yang berjudul "*Resimen Cakrabirawa (1962-1967)*" karangan Radite Jiwa Utama, dkk, dan artikel dari Aldi Septian dengan judulnya "*Cakrabirawa Dalam Kekuatan Militer Era Kepemimpinan Soekarno 1962-1967*".

Terdapat beberapa sumber skripsi serta tesis juga yang akan dipakai dari beberapa universitas, seperti skripsi dari Universitas Gadjah Mada berjudul "*Proses Pemindahan Ibukota Republik Indonesia (1946-1949): Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Jakarta*" dengan penulisnya Dionisius Agung Sulistio, skripsi karangan Radite Jiwa Utama yang berjudul "*Resimen Cakrabirawa (1962-1967)*" Universitas Airlangga, Skripsi dari Universitas Indonesia dengan judul "*Sejarah Kepolisian di Indonesia Tahun 1950-1952*" karangan Rosyidi. H. M. S., dan skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "*Peran Polisi Istimewa Dalam Pertempuran Surabaya Tahun 1945*" dari Haris Maulana. Sedangkan untuk tesis yang digunakan berjudul "*Tragedi Nasional: Studi Tentang Peristiwa Cikini Tahun 1957*" karangan Dahlan.